

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perekonomian yang dimiliki Indonesia merupakan ekonomi berbasis pasar, dimana pemerintah yang memiliki peranan terpenting. Sistem ekonomi di Indonesia merupakan sistem yang berdasarkan dari aturan-aturan, aspek dan mekanisme yang memiliki ketergantungan satu sama lainnya sebagai pengalokasian sumber daya milik negara kepada seluruh masyarakat dengan adil dan merata. Namun dalam implementasinya tujuan tersebut masih belum terealisasikan dengan baik. Hal inilah yang menjadi penyebab munculnya berbagai masalah termasuk krisis dalam ekonomi yang melanda Indonesia. Hal ini disebabkan karena timbulnya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dengan cara melakukan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN), sulitnya menjalankan penegakan hukum, monopoli dalam kegiatan perekonomian serta pelayanan terhadap publik yang kualitasnya memburuk (Sujana, dkk., 2014).

*Good Corporate Governance* belakangan ini merupakan hal mutlak yang sebaiknya dimiliki perusahaan. Krisis ekonomi di kawasan Asia dan Amerika Latin yang diyakini muncul karena kegagalan penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) (Daniri, 2005) dalam (Widjaja dan Ronny, 2014). Melihat kecurangan yang terjadi baik sampai di dunia bisnis Internasional tersebut membuat para praktisi dalam negeri sadar bahwa dibutuhkan adanya upaya

pencegahan kecurangan dalam perusahaan. Menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI, 2001) dalam (Widjaja dan Ronny, 2014), prinsip yang diperlukan dalam konsep *Good Corporate Governance* (GCG) yaitu *fairness, disclosure and transparency, accountability, responsibility, dan independency*.

Fakta kasus lain yang terlihat sebagai bukti lemahnya penerapan *Good Corporate Governance* adalah terjadinya kasus korupsi yang terbilang tinggi. Masalah – masalah inilah yang menyebabkan terhambatnya proses perekonomian yang baik di Indonesia, sehingga semakin meningkatnya jumlah pengangguran di Indonesia dan juga semakin banyaknya jumlah penduduk miskin. Penerapan *Good Corporate Governance* pada perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan hal yang mendesak, hal ini karena Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berada pada sistem pengelolaan yang tidak profesional. Pada hakikatnya para pengelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN) belum *concern* dengan konsep dan prinsip *Good Corporate Governance* yang sudah menjadi acuan banyak perusahaan Internasional. Memang ada beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang sudah mulai memperkenalkan tapi belum menerapkan secara *substantive*. Tampaknya tidak ada alternatif lain untuk menyelamatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dari keruntuhan, kecuali menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* yang mampu mendorong terpeliharanya aspek-aspek transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggung-jawaban, dan kewajaran dalam perusahaan (Trimanto dan Lena, 2010: 2) dalam (Lestari, 2014).

Dari contoh kasus tersebut yang menyebabkan penerapan dari *Good Corporate Governance* tidak berjalan dengan baik. Kasus tersebut terjadi karena perusahaan tidak melakukan *control*/ pengendalian dengan baik dan pengelolaan manajemen perusahaan yang tidak baik.

Widjaja dan Ronny (2014) mengemukakan bahwa dunia perusahaan keluarga menghasilkan bauran dari bisnis, keluarga, dan kepemilikan yang dapat menyebabkan kesulitan untuk perencanaan dan penyelesaian masalah akibat tumpang tindih antara ketiga kelompok sering menyebabkan sudut pandang yang berbeda antara individu. Dengan adanya *Good Corporate Governance* dalam perusahaan keluarga swasta dapat menghindarkan dari persaingan antara saudara dan litigasi antara anggota keluarga akibat adanya pandangan yang berbeda berkaitan dengan bisnis.

Dengan diterapkannya *Good Corporate Governance*, perusahaan diharapkan mampu mengatasi berbagai masalah akibat benturan kepentingan antara pihak-pihak terkait, seperti pemegang saham, dewan komisaris dan para pemangku kepentingan lainnya (*stakeholders*). Tata kelola perusahaan yang baik dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah budaya perusahaan yang mendukung *Good Corporate Governance* dalam sistem kerja manajemen, peraturan dan kebijakan perusahaan tentang penerapan nilai-nilai *Good Corporate Governance*, dan sistem pengendalian internal perusahaan. Faktor lain yang juga berperan penting adalah kualitas, kemampuan, integritas dan kredibilitas berbagai pihak yang menggerakkan perusahaan (Priscilla dan Eka, 2012).

*Good Corporate Governance* merupakan konsep yang diajukan demi peningkatan kinerja perusahaan melalui supervisi atau *monitoring* kinerja manajemen dalam menjamin akuntabilitas manajemen terhadap *stakeholders* dengan mendasarkan pada kerangka peraturan yang berlaku. Sistem *Good Corporate Governance* yang sehat harus menyediakan perlindungan yang efektif bagi para pemegang saham dan kreditur, sehingga mereka dapat menyakinkan diri dari mendapatkan *return* atas investasi yang tepat. Sistem *Good Corporate Governance* juga membantu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan efisiensi dan berkelanjutan bagi sektor korporat (Gusnardi, 2008: 35) dalam (Lestari, 2014).

Tujuan dari penerapan *Good Corporate Governance* adalah menciptakan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan. Hal ini disebabkan karena *Good Corporate Governance* dapat mendorong terbentuknya pola kerja manajemen yang bersih, transparan dan profesional. Implementasi *Good Corporate Governance* dalam pengelolaan perusahaan mencerminkan bahwa perusahaan tersebut telah dikelola dengan baik dan transparan. Hal tersebut merupakan modal dasar bagi timbulnya kepercayaan publik sehingga perusahaan tersebut lebih diminati investor dan dapat meningkatkan nilai sahamnya. Selain itu, implementasi *Good Corporate Governance* di perusahaan dapat membuat akses sumber modal yang mudah dan murah, disamping memiliki risiko yang terkendali (Efendi, 2009) dalam (Lestari, 2014).

Manfaat penerapan implementasi *Good Corporate Governance* antara lain pertama, *Good Corporate Governance* bukan hanya membentuk *system check and*

*balance* yang efektif dan mengeliminir *mismanagement* akan tetapi lebih dari itu akan menjamin kokohnya korporasi seiring dengan meningkatnya kinerja melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik dan efisiensi. Kedua, meningkatnya nilai (*value*) korporasi karena perbaikan kinerja keuangan, mengurangi resiko terjadinya keputusan tidak *fair*, dan dikelola atas dasar *best practice*, yang pada gilirannya akan meningkatkan *value*, dan ketiga, meningkatkan kepercayaan investor (Wilson Arafat: 208 dalam Hanifah, 2010:294) dalam (Lestari, 2014).

Keberhasilan penerapan *Good Corporate Governance* juga tidak terlepas dari peran pengendalian internal yang baik dan mampu memenuhi kebutuhan *stakeholders* serta menjalankan fungsi pengawasan atas pelaksanaan internal kontrol dalam sebuah organisasi. Struktur pengendalian internal mencakup lima kategori kebijakan dan prosedur yang dirancang serta digunakan oleh manajemen untuk memberikan keyakinan memadai bahwa tujuan pengendalian dapat dipenuhi. Kelima kategori tersebut merupakan komponen dari sistem pengendalian internal yaitu: (1) lingkungan pengendalian, (2) penetapan risiko manajemen, (3) sistem informasi dan komunikasi akuntansi, (4) aktivitas pengendalian dan (5) pemantauan. (Wijaya, dkk., 2014).

Lingkungan kendali terdiri dari tindakan, kebijakan, dan prosedur yang mencerminkan keseluruhan sikap dari manajemen puncak, para direktur dan pemilik dari suatu entitas mengenai pengendalian internal dan arti pentingnya bagi entitas. Penilaian risiko adalah identifikasi manajemen dan analisis risiko yang relevan dengan persiapan laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip

akuntansi berterima umum. Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur sebagai tambahan yang termasuk dalam empat komponen yang lain yang membantu memastikan bahwa tindakan yang perlu telah diambil untuk mengatasi risiko dalam pencapaian sasaran hasil entitas tersebut. Sistem informasi dan komunikasi berguna untuk mencatat, memproses, dan melaporkan transaksi entitas dan memelihara akuntabilitas untuk aset yang terkait. Pengawasan terkait dengan penilaian berkala atau berkelanjutan dari mutu penampilan atau prestasi pengendalian internal oleh manajemen (Morita, 2013). Sistem pengendalian internal yang efektif dapat menghindarkan perusahaan dari kerugian besar dan sebaliknya tanpa sistem pengendalian internal yang efektif maka kendala atau risiko yang dapat menyebabkan kerugian besar dapat berlangsung lama tanpa terdeteksi oleh pemilik perusahaan (Wijaya, dkk., 2014).

Menurut (Wijaya, dkk., 2014), efektivitas dari implementasi sistem pengendalian internal dapat meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi, terutama terhadap perwujudan transparansi laporan keuangan. Selanjutnya (Wijaya, dkk., 2014) mengatakan bahwa selain sistem pengendalian perusahaan, faktor internal lain perlu mendapatkan perhatian terkait dengan penerapan *Good Corporate Governance* adalah budaya organisasi. Budaya yang tumbuh merefleksikan visi, strategi dan pengalaman orang-orang yang mengimplementasikan nilai-nilai budaya dan etika perusahaan, budaya yang kuat akan menjadi pengungkit bagi pedoman perilaku bagi tiap anggota organisasi. Hal ini akan membantu para anggota organisasi untuk

melakukan tugasnya dengan lebih baik. Sehingga dalam penerapan *Good Corporate Governance* sangat perlu ditunjang dengan adanya budaya organisasi yang baik pula.

Baik buruknya *Good Corporate Governance* memiliki keterkaitan dengan pengendalian internal yang ada dalam perusahaan tersebut. Selain itu juga, pengendalian internal juga dapat menjelaskan penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* dapat diterapkan dengan baik apabila perusahaan memiliki pengendalian internal yang efektif. Pengendalian internal yang efektif diperlukan oleh semua aspek-aspek usaha, terutama apabila melibatkan penggunaan harta-harta perusahaan. (Pratolo, 207: 3) dalam (Lestari, 2014).

Dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) Sistem Pengendalian Internal meliputi organisasi serta semua metode dan ketentuan yang terkoordinasi yang dianut dalam suatu perusahaan untuk melindungi harta miliknya, memeriksa kecermatan dan keandalan data akuntansi, meningkatkan efisiensi usaha, dan mendorong di taatinya kebijakan manajemen yang telah digariskan. Tujuan utama dari pengendalian internal adalah tercapainya: a) Reliabilitas dan integritas informasi; b) Kepatuhan terhadap kebijakan, rencana, prosedur, hukum dan kebijakan; c) Pengamanan aset; d) Penggunaan sumber daya secara ekonomis dan efisien; dan e) Pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk operasi dan program (Morita, 2013: 6) dalam (Lestari, 2014) .

Selain itu (Mintje, 2013) menyatakan bahwa salah satu pendekatan dalam menghadapi era globalisasi karena persaingan regional dan global yang semakin

ketat ini ialah dengan menerapkan konsep *Total Quality Management* dalam industri manufaktur dan jasa serta strategi mempersiapkan diri dengan mengembangkan kualitas karyawan dan manajer dengan tujuan meningkatkan kualitas proses produksi dan produktivitas secara optimal dan berkelanjutan. Implikasi teknik *Total Quality Management* harus diikuti pula dengan penerapan komplemen-komplemen dari sistem akuntansi manajemen. Adapun komplemen-komplemen tersebut adalah sistem penghargaan dan sistem pengukuran kinerja. Sistem pengukuran kinerja dan sistem penghargaan merupakan alat pengendalian penting yang digunakan oleh perusahaan untuk memotivasi karyawan agar mencapai tujuan perusahaan dengan perilaku sesuai dengan yang diharapkan oleh perusahaan.

Salah satu pola pendekatan *Total Quality Management* adalah dengan menggunakan pendekatan paradigma. Paradigma adalah suatu kumpulan ide-ide, biasanya tidak tertulis, yang telah dipelajari melalui pengalaman dan mendefinisikan suatu aturan yang alamiah. Suatu paradigma berlaku sebagai saringan mental, yang merupakan batasan dalam berfikir tentang segala sesuatu melalui penjabaran kondisi-kondisi pembatas yang biasanya berlebihan daripada kenyataan sesungguhnya (*imagineering*). Pengendalian internal dan pengelolaan manajemen perlu ditingkatkan perusahaan demi terciptanya *Good Corporate Governance* (<https://jonizulkarnain.wordpress.com/total-quality-management/>).

*Good Corporate Governance* yang baik haruslah disinergikan ke dalam *Total Quality Management*, agar gaya manajemen perusahaan bisa berjalan sesuai dengan konsep manajemen mutu yang didalamnya diperkuat oleh prinsip-

prinsip *Good Corporate Governance*. Semua ini diperlukan, agar perusahaan bisa menjalankan strategi bisnisnya secara mulus, sekaligus dapat mengidentifikasi dan mengatasi berbagai potensi risiko yang bisa merusak reputasi dan kredibilitas perusahaan di mata *stakeholdernya*. Praktik *Good Corporate Governance* tidaklah boleh sekedar menjadi alat kontrol yang berlebihan, tapi harus menjadi alat yang memperkuat fungsi-fungsi manajemen untuk memberikan kualitas terbaik kepada *stakeholder* (<http://djajendra-motivator.com/?p=366>). Dari beberapa hasil penelitian menunjukkan, banyak perusahaan mengalami masalah dalam mengembangkan *Total Quality Management* (TQM). Dari beberapa masalah yang diidentifikasi bahwa perubahan budaya organisasi adalah sebagai penghalang utama penerapan *Total Quality Management*, antara lain lemahnya hubungan kerja sama pada tingkat fungsional (Pasaribu, 2010).

Keberhasilan implementasi *Good Corporate Governance* sangat bergantung pada nilai-nilai yang dianut dan dipraktikan di lingkungan perusahaan (Arief, 2009) dalam Hanifah (2011). Selanjutnya Hanifah (2011) menambahkan bahwa faktor budaya merupakan inti terciptanya *Good Corporate Governance*. Fenomena yang terjadi di lapangan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* ini dalam kenyataan menemui banyak kendala, diantaranya adalah masalah penyimpangan yang banyak terjadi, misalnya adanya penyelewengan-penyelewengan terutama dalam hal pengelolaan keuangan (Dewi Saptantinah, 2010) dalam Sumadyo (2013). Fenomena lain yang dapat di temukan yaitu pada 2009 sebesar 52,10% dari total pendapatan BUMN berasal dari sektor energi dan peralatan yaitu Pertamina dan PLN yang mencatat pendapatan terbesar (38%) dan

terbesar kedua (14,10%), serta BUMN yang *go public* di Bursa Efek Indonesia mencetak pendapatan sebesar 14% dari total pendapatan BUMN, artinya sebesar 33,90% pendapatan BUMN berasal dari 122 BUMN (Laporan Kinerja 2009) dalam Hanifah (2011). Selanjutnya Hanifah (2011) menambahkan bahwa kejadian tersebut dipicu akibat kurang optimalnya kinerja keuangan BUMN. Sejalan dengan perkembangan kegiatan ekonomi muncullah peran komite audit yang berperan dalam mengurangi adanya penyimpangan-penyimpangan dalam perusahaan (Sumadyo, 2013). Oleh karena itu komisaris dan dewan pengawas wajib membentuk komite audit yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu komisaris dan dewan pengawas dalam melaksanakan tugasnya. Pembentukan komite audit diharapkan memberikan kontribusi dalam memperbaiki *Good Corporate Governance* karena komite audit merupakan perangkat dewan komisaris, unit organisasi yang mendapat mandat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dalam hal pengawasan. Salah satu tugas dari komite audit yaitu untuk memelihara independensi akuntan pemeriksa terhadap manajemen (Sumadyo, 2013).

Penelitian mengenai Pengendalian internal, *Total Quality Management* dan Komite Audit dengan variabel dependen *Good Corporate Governance* masih jarang di temukan. Dapat dilihat dari beberapa penelitian atau studi empiris. (Wijaya, dkk., 2014) meneliti variabel implementasi pengendalian *intern*, budaya organisasi dan *Total Quality Management* dengan hasil adanya pengaruh implementasi pengendalian *intern*, budaya organisasi dan *Total Quality Management* berpengaruh signifikan terhadap penerapan *Good Corporate*

*Governance*. Berbeda dengan hasil penelitian (Nauli, dkk., 2014) yang menyatakan Satuan pengendalian *intern* tidak berpengaruh terhadap pelaksanaan *Good Corporate Governance*, artinya efektifitas peran satuan pengendalian *intern* tidak berhubungan langsung dengan penerapan *Good Corporate Governance*. Sedangkan terdapat pengaruh signifikan dan positif peran komite audit terhadap pelaksanaan *Good Corporate Governance*, artinya pelaksanaan *Good Corporate Governance* tidak dapat dipisahkan dengan peran komite audit. Semakin efektif komite audit berperan maka pelaksanaan *Good Corporate Governance* akan semakin baik. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan Hanifah (2011) yang menyatakan struktur kepemilikan, budaya organisasi, komite audit, dan audit internal secara simultan dan parsial berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap pelaksanaan *Good Corporate Governance*. Sedangkan Sumadyo (2013) menyatakan bahwa independensi auditor internal dan komite audit secara simultan dan parsial berpengaruh signifikan terhadap *Good Corporate Governance*. Pasaribu (2010) yang menemukan bahwa adanya pengaruh signifikan antara komitmen, persepsi, dan penerapan pilar dasar *Total Quality Management* terhadap kinerja manajerial sebagai acuan untuk mencapai *Good Corporate Governance*. Berbeda dengan Mintje (2013) yang menyatakan *Total Quality Management* terdapat pengaruh yang tidak terlalu signifikan terhadap kinerja manajerial sebagai acuan untuk mencapai *Good Corporate Governance*.

Adanya hasil temuan yang tidak konsisten dari beberapa penelitian sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian *Good Corporate*

*Governance* yang dipengaruhi oleh pengendalian internal, *Total Quality Management*, dan Komite Audit. Baik buruknya *Good Corporate Governance* memiliki keterkaitan dengan pengendalian internal yang ada dalam perusahaan tersebut. Selanjutnya *Good Corporate Governance* yang baik haruslah disinergikan ke dalam *Total Quality Management*, agar gaya manajemen perusahaan bisa berjalan sesuai dengan konsep manajemen mutu yang didalamnya diperkuat oleh prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Selain itu, Pembentukan komite audit diharapkan memberikan kontribusi dalam memperbaiki *Good Corporate Governance* karena komite audit merupakan perangkat dewan komisaris, unit organisasi yang mendapat mandat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dalam hal pengawasan.

Berdasarkan Hal tersebut maka, penulis melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pengendalian Internal, *Total Quality Management* dan Komite Audit terhadap penerapan *Good Corporate Governance* (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2011-2013)”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Dari latar belakang penelitian yang telah dijelaskan di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Perusahaan-perusahaan manufaktur yang berada di Indonesia belum melakukan pengendalian internal dengan baik sehingga menimbulkan masalah dalam *Corporate Governance* yaitu tindak korupsi.

2. Penerapan *Total Quality Management* khususnya dalam meningkatkan motivasi dan kinerja karyawan masih kurang baik sehingga mempengaruhi *Good Corporate Governance*.
3. Penerapan Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* seperti keterbukaan informasi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kesetaraan dan kewajaran tidak berjalan dengan baik dan tidak sepenuhnya diterapkan oleh perusahaan manufaktur.
4. Pengelolaan keuangan yang tidak baik sehingga diperlukan pembentukan komite audit dalam perusahaan dalam mengurangi adanya penyimpangan-penyimpangan yang terjadi.
5. Diperlukan kesadaran perusahaan mengenai pentingnya peningkatan pengendalian internal yang baik demi tercapainya *Good Corporate Governance*.
6. Diperlukan juga kesadaran perusahaan mengenai pentingnya peningkatan dan penerapan *Total Quality Management* yang baik demi tercapainya *Good Corporate Governance*.
7. Diperlukan kesadaran perusahaan mengenai pentingnya pembentukan Komite Audit demi tercapainya penerapan *Good Corporate Governance*.

### **C. Pembatasan Masalah**

Dari identifikasi masalah yang ada terlihat terdapat banyak faktor yang mempengaruhi *Good Corporate Governance*. Karena keterbatasan waktu dan biaya maka penelitian dibatasi hanya pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek

Indonesia pada tahun 2011-2013 yang mengeluarkan dan mempublikasikan laporan keuangan dan data jumlah penjualan produk, dengan variabel dependen yaitu penerapan *Good Corporate Governance* serta variabel independen yaitu pengendalian internal, *Total Quality Management* dan Komite Audit.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Identifikasi Masalah yang ada, permasalahan pokok dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah variabel pengendalian internal berpengaruh terhadap penerapan *Good Corporate Governance*?
2. Apakah variabel *Total Quality Management* berpengaruh terhadap penerapan *Good Corporate Governance*?
3. Apakah variabel Komite Audit berpengaruh terhadap penerapan *Good Corporate Governance*?

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini yaitu :

1. Kegunaan Teoritis
  - 1) Bagi penulis penelitian ini berguna untuk menambah wawasan dan pemahaman tentang teori dari pengendalian internal, *Total Quality Management* dan Komite Audit dalam kaitannya dengan penerapan *Good Corporate Governance* (tata kelola perusahaan yang baik).

2) Bagi fakultas, penelitian ini bisa menjadi referensi penelitian lain yang akan mengajukan dengan judul atau variabel serupa. Dan juga dapat menambah pengetahuan dibidang akuntansi, khususnya akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen yang telah dipelajari selama di bangku perkuliahan.

## 2. Kegunaan praktis

- 1) Bagi perusahaan dan praktisi penelitian diharapkan menjadi bahan acuan atau pertimbangan mengenai pentingnya penerapan *Good Corporate Governance* (tata kelola perusahaan yang baik).
- 2) Bagi penulis penelitian ini memperdalam dan memperluas mengenai ilmu di bidang akuntansi yang telah dipelajari selama empat tahun di fakultas ekonomi Universitas Negeri Jakarta serta dapat menerapkannya didalam kehidupan sehari-hari.